

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda. Selain memiliki kekayaan sosio-kultural, Indonesia juga dikenal luas karena kekayaan akan sumber daya alamnya. Kekayaan ini membentang luas di seluruh pelosok wilayah Nusantara. Kelimpahan alam ini menempatkan Indonesia sebagai titik sentral pencarian rempah-rempah oleh bangsa asing. Kedatangan bangsa Eropa ke bumi Nusantara bertujuan untuk mencari hasil bumi yang tidak diperoleh di wilayah negara mereka sendiri.¹ Namun, tak dapat dimungkiri bahwa dalam perjalanan waktu motif awal kehadiran mereka di bumi Nusantara berubah tidak hanya sekadar mencari hasil pertanian, tetapi juga berupaya untuk menguasai, bahkan mendominasi masyarakat di wilayah jajahan mereka.

Potensi kekayaan alam Nusantara membuat mereka menciptakan berbagai produk hukum dan aturan sesuai kepentingan mereka. Sebab, hal itu dibuat untuk membatasi intervensi masyarakat pribumi dalam mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahan sekaligus untuk mengendalikan kekuasaan mereka. Abdullah, sebagaimana dikutip Miftakhudin, mengatakan, “Salah satu pengaruh kolonialisme dalam politik hukum Indonesia adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang bersifat kolonialistik (dibuat untuk melindungi dan memperkuat kolonialisme).”² Kondisi ini secara terang-terangan mendiskreditkan penduduk pribumi demi makin banyak memperoleh hasil bumi, terutama di daerah yang memiliki hasil bumi yang menggiurkan. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut, hasil bumi yang diperoleh didistribusikan ke negeri mereka dan warga masyarakat pun sulit mengambil kembali. Masyarakat pribumi yang terjajah lantas terus hidup dalam kemiskinan di atas tanahnya sendiri. Hal ini makin diperparah oleh minimnya sumber daya manusia dalam mengelola potensi alam yang dimiliki. Lebih daripada itu, konstruksi hidup warga masyarakat pun belum maksimal ditata

¹ Miftakhuddin, *Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni* (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 39.

secara baik karena minimnya akses pendidikan dan infrastruktur, serta tiadanya sistem yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dominasi bangsa Eropa atas daerah Nusantara makin memperparah kondisi hidup warga masyarakat asli. Sebagai penjajah, mereka hanya fokus pada pencarian keuntungan secara ekonomis atas wilayah jajahan. Jed, sebagaimana dikutip Miftakhuddin, merumuskan ciri-ciri pokok kolonialisme sebagai berikut, “Kolonialisme berwatak ekspansif, kolonialisme berwatak diskriminatif, kolonialisme berwatak menindas, dan kolonialisme berwatak menguras.”³ Karakteristik semacam ini merupakan modus yang diperlihatkan untuk menakut-nakuti warga masyarakat setempat di tengah minimnya sumber daya manusia. Kehadiran bangsa asing di tengah wilayah Nusantara sama sekali tidak memikirkan kesejahteraan hidup warga setempat justru mempertebal garis kemiskinan dan makin memperlebar jarak hak masyarakat pribumi atas daerah sendiri. Dengan kata lain, akses masyarakat terhadap sumber daya alam Nusantara bergantung pada instruksi orang-orang pendatang. Di hadapan bangsa asing, penduduk asli tunduk dan patuh melakukan sesuatu sesuai yang diperintahkan kepada mereka.

Berhadapan dengan kenyataan di atas, gerakan persatuan untuk melawan penindasan bangsa asing mulai dilakukan, terutama ketika Belanda mengirim rakyat pribumi ke Eropa untuk melanjutkan pendidikan. Motivasi awal pengiriman tersebut demi membantu kelancaran pelayanan administrasi di wilayah kekuasaan Belanda. Namun, kebijakan ini justru membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan untuk membendung dominasi bangsa asing. Ruang-ruang diskusi pun dibuka guna memformulasikan sikap bersama dalam keberagaman di tengah masifnya penindasan dari bangsa penjajah. Maka, semenjak munculnya Budi Utomo, Serikat Islam, *Indische Partij*, *Indische Vereeniging* (*Indonesische Vereeniging*, Perhimpunan Indonesia) sampai GAPI (Gabungan Politik Indonesia) sampai dengan kemerdekaan merupakan tampilan ruang publik kreatif brilian.⁴ Spirit yang menjiwai terbentuknya kelompok organisasi ini merupakan

³ *Ibid.*, hlm. 56-57.

⁴ Andreas Doweng Bolo dkk., *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 161.

reaksi terhadap keberadaan negara (kolonial) yang asing.⁵ Modal utama untuk keluar dari kepungan penjajah membutuhkan suatu tekad dan niat bersama yang daripadanya gerakan melawan kekuatan pemerintahan Belanda optimal diwujudkan sembari berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Persatuan pemikiran dibutuhkan bukan hanya sekadar untuk mengusir bangsa asing, tetapi juga jauh lebih dari itu adalah bagaimana memperjelas nasib wilayah ini di masa depan. Di sini, jelas memperlihatkan bahwa penentuan nasib wilayah Nusantara dan kehidupan masa depan masyarakat pada khususnya menjadi bagian penting dari perjuangan menuju kemerdekaan. Formasi pemikiran tersebut digaungkan dalam berbagai kelompok diskusi dan kelompok organisasi yang dibentuk di atas. Uniknya, forum diskursus perlawanan terhadap penjajah dipelopori oleh berbagai kalangan. Fakta pemerasan yang dilakukan Belanda mendorong mereka untuk bersatu membebaskan wilayah Nusantara dari belenggu bangsa asing. Solidaritas antarsesama anak bangsa pun dibangun tanpa perbedaan atas perbedaan latar belakang yang melekat di dalam diri mereka masing-masing.

Idealisme dan optimisme pembentukan kemerdekaan Indonesia melahirkan integrasi sosial dari berbagai unsur lapisan masyarakat Nusantara. Latar belakang munculnya persatuan warga di sini didasari oleh kondisi masyarakat selama berabad-abad lamanya dikuasai oleh bangsa penjajah. Karena itu, kesadaran masyarakat mengorientasikan diri kepada upaya kemerdekaan. Perjuangan pembebasan dari kekuasaan bangsa asing tidak berpihak pada pemenuhan kepentingan kelompok tertentu, melainkan merupakan perwujudan keinginan bersama untuk memisahkan diri dari pihak luar. Perbedaan identitas agama, suku dan budaya bersatu berjuang melawan penjajahan. Gambaran terhadap wajah baru Nusantara berdiri di antara keberagaman warna hidup masyarakat dan bukan sebaliknya. Dengan begitu, dunia pasca-tradisional ditata dalam *nation-state*, jadi tidak berdasarkan kesukuan, tradisi feodal atau ideologi.⁶

⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* cet. VII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 378.

⁶ Franz Magnis-Suseno, "Di Abad Ke-21: Pancasila Apa Masih Diperlukan?", *Jurnal Pancasila*, 3:2 (Yogyakarta, September 2022), hlm. 8.

Keberagaman warna hidup masyarakat Indonesia merupakan suatu kenyataan yang tak dapat ditolak. Karena itu, diperlukan suatu rumusan bersama sebagai tolak ukur kehidupan publik. Bahwasanya untuk mewujudkan ruang kehidupan yang harmonis, mesti ada kompas yang dapat mengarahkan semua menuju satu titik yang dikehendaki bersama. Hal inilah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan dasar Indonesia merdeka berdasarkan prinsip kesetaraan dan kekeluargaan sehingga dapat mengayomi warna hidup masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah, Soekarno menyatakan: “Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua”.⁷ Di sini, secara implisit Soekarno ingin mendasarkan negara Indonesia di atas semua kepentingan dan keinginan kelompok mayoritas. Fondasi pembentukan dasar bangsa Indonesia tidak boleh dilepaspisahkan dari tradisi hidup masyarakat. Namun, sebaliknya dasar negara Indonesia harus dibangun di atas kondisi riil semua masyarakat Indonesia terlepas dari latar belakang yang dimiliki. Artinya bahwa keberagaman pandangan hidup dari warga masyarakat Indonesia harus dihargai dan dihormati oleh semua kita sehingga bangsa Indonesia yang plural ini diterjemahkan dalam satu identitas yang disebut *Bhineka Tunggal Ika*. Dengan demikian, dasar negara Indonesia yang akan dibentuk harus dapat diterima, diakui dan disetujui dalam satu tarikan nafas oleh semua warga Nusantara. Pada titik inilah, Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau fundamen, filsafat, yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat sedalam-dalamnya dari Indonesia merdeka yang akan berdiri kekal abadi.⁸ Dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat menjawab semua perbedaan identitas, perekat bangsa dan diakui sebagai produk asli masyarakat sendiri. Dalam pemikiran Soekarno, Pancasila merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang mendiami bumi Nusantara. Karena itu, Pancasila bukan barang impor.⁹ Ia merupakan representasi masyarakat Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan yang

⁷ Andreas Doweng Bolo dkk., *op. cit.*, hlm. 24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 8.

telah mengakar kuat di dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal, warna hidup masyarakat tersebut sudah dihidupi dan dihayati secara intens sehingga upaya untuk merumuskan dasar bangsa Indonesia pascakemerdekaan merupakan suatu terobosan Soekarno untuk dapat mengangkat semua identitas masyarakat tersebut sebagai identitas nasional.

Pascaproklamasi kemerdekaan, Indonesia dilanda beragam peristiwa politik. Salah satu peristiwa yang mengubah tatanan politik di tanah air adalah reformasi 1998. Kejadian ini disebut sebagai era baru arah perpolitikan di Indonesia. Mundurnya presiden Soeharto pada pertengahan Mei 1998 tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu tatanan politik yang lebih mengedepankan kesejahteraan umum sebagai bentuk perwujudan kemerdekaan Indonesia. Setidaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa, aktivis, dan akademisi menampilkan wajah baru sistem politik di tanah air. Di tingkat makro, perubahan itu terlihat dari adanya transformasi sistem politik Indonesia, dari yang sebelumnya bercorak otoriter ke arah yang lebih demokratis.¹⁰ Selain itu, reformasi 1998 juga melahirkan peradaban baru seperti adanya sistem multipartai, pelaksanaan pemilu yang relatif lebih demokratis, dan upaya menjadikan birokrasi dan militer sebagai kekuatan profesional tetapi netral secara politik.¹¹ Meskipun demikian, peralihan estafet kepemimpinan tersebut tidak secara otomatis berdampak signifikan terhadap ruang kehidupan politik yang lebih demokratis. Hasil penelitian *Economist Intelligence Unit* (EUI) menunjukkan bahwa nilai demokrasi di Indonesia pada periode 2021 sampai 2022 berkisar 6,71 dan masih tergolong sebagai demokrasi yang cacat (*flawed democracy*).¹² Angka demokrasi ini dinilai berdasarkan lima indikator dengan masing-masing memiliki poin yang beragam. Pemilu dan pluralisme 7,92, fungsi pemerintahan 7,86, partisipasi politik 7,22, kebebasan sipil 6,18 dan budaya politik 4,38.¹³ Data ini

¹⁰ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* cet. VI (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*

¹² Sarnita Sadya, "EUI: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022" dalam *DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/euiindekas-demokrasi-indonesia--sebesar-6,71-poin-pada-2022>, diakses pada 9 September 2024.

¹³ *Ibid.*

menunjukkan bahwa pascareformasi 1998, stabilitas kehidupan sosial-politik di Indonesia masih merupakan suatu proyek besar yang tak pernah selesai dikerjakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia.

Tak dipungkiri bahwa eksistensi sila ketiga Pancasila tengah dipertanyakan berhadapan dengan situasi politik bangsa ini. Guncangan persatuan Indonesia disebabkan oleh masifnya penggunaan identitas primordial sebagai kendaraan politik dalam tatanan perpolitikan bangsa hari ini. Motif utama eksploitasi nilai-nilai agama, suku dan budaya sebagai kendaraan politik praktis lahir dari intensitas persaingan merebut kursi kekuasaan. Belakangan ini, pertarungan politik baik di tingkat lokal hingga nasional mempertentangkan eksistensi latar belakang warga masyarakat. Orang-orang menggunakan politik tidak hanya untuk memajukan kepentingan mereka, tetapi juga untuk mendefinisikan identitas mereka.¹⁴ Fenomena ini secara kasat mata menunjukkan bahwa penggunaan identitas primordial sebagai modal politik sekadar bertujuan untuk kepentingan kelompok bersangkutan. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah rasa persatuan didasarkan atas kesamaan identitas. Hal ini bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang empiris berbeda identitas primordial, tetapi hidup bersama di dalamnya. Aktor utama terciptanya politisasi identitas datang dari masyarakat Indonesia sendiri terutama para elite politik dan para politisi tentunya.

Konsep persatuan dalam kehidupan politik Indonesia saat ini didasarkan pada kepentingan kolektif sejauh memiliki kesamaan suku, agama, budaya dan lainnya. Pembentukan opini masyarakat diikat oleh orasi dan wacana politik yang dihubung-hubungkan dengan nilai-nilai agama, budaya dan etnis. Lebih buruk lagi, kecenderungan untuk menjadikan identitas SARA sebagai kendaraan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) makin santer dipraktikkan di dalam berbagai aktivitas kontestasi politik dari level nasional hingga tingkat lokal. Perbedaan latar belakang agama, suku dan budaya telah merongrong masuk dalam agenda pilkada, pileg maupun pilpres. Gambaran persatuan sebagaimana diutarakan para pejuang kemerdekaan cenderung teralienasi dari ruang pemikiran masyarakat Indonesia dewasa ini. Panggung politik dijadikan sebagai arena pementasan kepentingan

¹⁴ Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: United States, 1996), hlm. 18.

eksklusif-partikular. Kapitalisasi identitas primordial merupakan instrumen paling strategis demi menggapai tujuan politik yang sifatnya jangka pendek. Disadari atau tidak, arena politik Indonesia hari ini didominasi oleh kaum mayoritas etnis, baik agama maupun budaya. Fenomena ini kemudian menciptakan disharmoni di level kehidupan sosial masyarakat akar rumput. Akibatnya, relasi dan komunikasi di tingkat masyarakat akar rumput terpecah dan terbagi ke dalam pelbagai kelompok yang dianggap dapat mengafirmasi kepentingan mereka.

Seiring dengan peristiwa di atas, tali pengikat pluralitas masyarakat Indonesia hanyalah sebatas tataran wacana teoretis, tetapi minus aksi praksis. Karena itu, diperlukan adanya modifikasi ruang pemikiran masyarakat di dalam praktik kehidupan politik. Sebab, berpolitik dalam konteks Indonesia meniscayakan adanya penghargaan timbal balik antarwarga negara. Dengan begitu, prinsip *Bhineka Tunggal Ika* merupakan referensi atas semua tata perumusan dan pelaksanaan kehidupan publik. Berdasarkan realitas tersebut, di bawah judul **PENGHAYATAN KONSEP NILAI PERSATUAN PADA MASA PRAKEMERDEKAAN DAN PASCAREFORMASI DI INDONESIA**, penulis berniat untuk mengangkatnya ke permukaan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang diselidiki dalam tulisan ini adalah, “Bagaimana penghayatan konsep nilai persatuan pada masa prakemerdekaan dan pascareformasi di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas dan dinamika politik Indonesia?”

Adapun masalah lain yang menjadi turunan dari masalah utama di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*. Bagaimana gambaran umum tentang sila persatuan dalam Pancasila? *Kedua*. Bagaimana gambaran umum mengenai konsep persatuan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: *Pertama*, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penghayatan konsep nilai persatuan pada masa prakemerdekaan dan pascareformasi di Indonesia. *Kedua*, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak penghayatan konsep nilai persatuan bagi stabilitas dan dinamika politik di Indonesia pascareformasi. *Ketiga*, bertujuan untuk

menjelaskan gambaran umum tentang sila persatuan dalam Pancasila. *Keempat*, menjelaskan gambaran umum mengenai konsep persatuan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penulis akan menjelaskan dan menganalisis sila Persatuan Indonesia pada masa prakemerdekaan dan pascareformasi dan peristiwa politik di Indonesia dalam rentang waktu sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan dan setelah reformasi. Karena itu, penulis akan berusaha menggali dan menganalisis berbagai literatur dari buku-buku, artikel, majalah, dan surat kabar serta berbagai sumber lain yang cocok dengan tema tulisan ini. Semua sumber tersebut dijadikan sebagai dasar teoretis bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Di bawah ini ini, penulis akan merangkum hasil penelitian terdahulu tentang sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”.

Pertama, dalam penelitiannya berjudul “Memahami Sila Persatuan dalam Konteks Keberagaman di Indonesia”, Talita Sembiring dan Yakobus Ndonga mengemukakan bahwa di tengah faktum pluralitas warna hidup masyarakat Indonesia, penerapan nilai sila ketiga Pancasila sangat berperan penting sebagai sebuah bukti kesetiaan dan pengabdian terhadap bangsa dan negara.¹⁵ Peneliti ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data. Adapun penelitian ini terfokus pada kerusuhan yang terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dan warga Madura sebagai orang pendatang. Kedatangan orang Madura ke Kalimantan mengubah dan mengancam pola hidup dan gaya hidup orang-orang Dayak yang menyebabkan terjadinya tragedi Sampit. Tragedi ini dipicu oleh pertumbuhan populasi migran Madura di Kalimantan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan persaingan ekonomi di antara kedua belah pihak.¹⁶

Kedua, Fitri Lintang Sari dan Fatma Ulfatun Najicha dalam penelitian mereka tentang “Nilai-nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia”, menyimpulkan bahwa pembentukan sikap nasionalisme di

¹⁵ Talita Sembiring dan Yakobus Ndonga, “Memahami Sila Persatuan dalam Konteks Keberagaman di Indonesia”, *Jurnal Risoma*, 2:4 (Medan, Juli 2024), hlm. 138.

¹⁶ *Ibid.*

tengah hidup masyarakat adalah bentuk perawatan, pengamalan dan penghargaan atas keberagaman kebudayaan di tanah air Indonesia. Hal ini mesti diupayakan karena sikap nasionalisme dapat menarik warga masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa.¹⁷ Nasionalisme dapat mempersempit sikap egosentrisme. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan tiga komponen yakni; keragaman suku bangsa, keberagaman seni dan budaya, keberagaman bahasa dan keberagaman religi terbesar yang menyebar di beberapa daerah di Indonesia.¹⁸

Ketiga, Tobias Kardiman menyoroti gerakan kriminal dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang inklusif sebagaimana diamanatkan dalam demokrasi Pancasila. Dalam penelitiannya berjudul “Sila Ketiga Pancasila Fondasi Dalam Menyukkseskan Demokrasi Inklusif (Sebagai Upaya Menangkal Politik Identitas)” ditemukan bahwa sesungguhnya demokrasi Pancasila merupakan strategi penangkal untuk melindungi kesatuan dan keutuhan bangsa dari pelbagai usaha dan gerakan kriminal. Nilai-nilai Pancasila dapat menyadarkan dan merangsang warga masyarakat untuk membangun kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama, menjadikan Pancasila sebagai jiwa dan kehidupan bangsa, jiwa kebersatuan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menganalisis hasil studi terdahulu dari buku dan artikel yang cocok dengan tema penelitian.

Sementara itu, hasil temuan di dalam penelitian ini adalah bahwa penghayatan konsep nilai persatuan pada masa prakemerdekaan sampai berakhirnya masa kekuasaan Soeharto pada 1969 bercorak antroposentris. Memasuki masa reformasi, penghayatan konsep nilai persatuan berubah menjadi etnosentris. Dikatakan demikian karena degradasi penghayatan sila ketiga Pancasila selalu membuntuti jalannya reformasi setelah diberlakukan pada pertengahan 1998. Sejak dimaklumkan sebagai era baru sistem berpolitik di Indonesia, isu-isu SARA dipergunakan secara masif oleh para elite politik di berbagai momen pemilihan

¹⁷ Fitri Lintang Sari dan Fatma Ulfatun Najicha, “Nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan di Indonesia”, *Jurnal Global Citizen*, 10:1 (Surakarta, Juli 2022), hlm. 80.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁹ Tobias Kardiman, “Sila Ketiga Pancasila Fondasi Dalam Menyukkseskan Demokrasi Inklusif (Sebagai Upaya Menangkal Politik Identitas)”, *Jurnal Sovereignty*, 3:1, (Surakarta, Maret 2024), hlm. 20.

umum (pemilu). Persis di sini, konsep nilai persatuan lantang terdengar pada sambutan para pejabat di berbagai tingkatan pada pesta-pesta kenegaraan atau acara-acara formal lainnya. Partisipasi publik dalam hajatan pemilu mengubah wajah Indonesia yang sangat majemuk menjadi pertarungan antarkelompok atau SARA. Gejala ini semakin mempertajam pertikaian dan memperluas perpecahan di antara sesama warga negara hanya karena berbeda pilihan politik.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bagian ini membahas tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, Sekilas tentang Pancasila yang berisi gambaran umum tentang Pancasila, sila ketiga Pancasila, dan politik di Indonesia.

Bab III, pada bagian ini, penulis akan menjelaskan konsep nilai persatuan dan kondisi politik di Indonesia setelah reformasi. Fokus utama yang akan dikaji dalam bagian adalah kondisi politik di Indonesia setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Pada bagian ini, penulis akan mengkaji penghayatan konsep nilai persatuan dan menjelaskan dampaknya bagi kondisi politik di Indonesia pascareformasi. Secara terperinci, penulis akan menganalisis dampak konsep nilai persatuan bagi praktik berpolitik di Indonesia setelah reformasi. Selanjutnya, pandangan penulis tentang dampak sila ketiga Pancasila terhadap kondisi politik di Indonesia.

Bab V, Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.